KontraS
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

GRARIA
A
4
N

ulau Kecil
an
Hak Asasi Manusia

Catatan Situasi HAM di Pulau Bangka (Sulut), Pulau Sunut (NTB), dan Pulau Romang (Maluku)

PUSTAKA
K P
323
KO
P

KontraS
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099
Email: kontras_98@kontras.org | Web: www.kontras.org

PENGANTAR

Pada tahun 2017, Indonesia memiliki 16.056 (Kemendagri, 2018). Jumlah ini berkurang 1.448 pulau dari sebelumnya sebanyak 17.504 pulau. Sementara, 13.466 pulau telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (2011), Sekitar 80 persen pulau berkategori pulau kecil dengan luas kurang dari 2.000 kilometer persegi.

Dalam pengelolaan pulau kecil, seringkali terjadi banyak perdebatan baik dari segi ekonomi, geopolitik, hingga sosial budayanya. Perbedaan cara pandang ini menimbulkan intervensi yang justru merugikan masyarakat pulau.

Indonesia bisa jadi diuntungkan dengan banyaknya pulau kecil, tetapi akan menjadi ancaman ketika pulau-pulau tersebut tidak dikelola dengan baik.

PERMASALAHAN DI PULAU KECIL

01 Belum jelasnya definisi operasional pulau-pulau kecil

02 Kurangnya data dan informasi tentang pulau-pulau kecil

03 Kurangnya keberpihakan pemerintah pada pengelolaan pulau-pulau kecil

04 Isu pertahanan dan keamanan kedaulatan negara

05 Disparitas perkembangan sosial dan ekonomi

06 Terbatasnya sarana dan prasarana dasar untuk kebutuhan masyarakat

07 Konflik kepentingan dalam pengelolaan wilayah di pulau kecil.

08 Degradasi lingkungan akibat kegiatan ekstraktif

1.500 PULAU KECIL DI INDONESIA AKAN TENGGELAM

Penyebab utama dari prediksi tenggelamnya pulau-pulau tersebut karena adanya pembangunan di sektor industri ekstraktif dan abrasi pantai akibat naiknya permukaan air laut.

Ditambah lagi, tidak adanya perhatian dalam pembangunan di wilayah pulau-pulau kecil yang mengakibatkan munculnya kegiatan eksploitasi ilegal maupun legal yang dapat mengancam ekologi di pulau kecil.



TEMUAN KONTRAS

KontraS melakukan penelitian terhadap tiga pulau kecil di Indonesia, Pulau Sunut (Lombok Timur), Pulau Bangka (Sulawesi Utara), dan Pulau Romang (Maluku Barat Daya). Ketiga pulau tersebut memiliki latar belakang masalah yang berbeda-beda tetapi berdampak, sama, yaitu investasi yang hadir di sana tidak menyejahterakan masyarakat, sebaliknya kehadiran investor bahkan membuat kehidupan masyarakat dan kondisi lingkungan memburuk.

PULAU SUNUT

PRIVATISASI PULAU

Pada 2011, seluruh warga di Pulau Sunut dipindahkan ke daratan demi proyek privatisasi pulau diduga oleh PT. Ocean Blue. Pulau tersebut direncanakan akan dibangun 46 buah villa mewah dengan rincian sebagai berikut: 31 vila menghadap samudera, 1 buah villa untuk bulan madu, 7 bungalows, 6 vila terpisah dari pulau, dan 2 vila mewah yang akan membuat pengunjung seolah memiliki sebuah pulau.

perpindahan tersebut didorong oleh sejumlah janji yang disampaikan korporasi melalui Pemda Lombok Timur yang mengatakan akan turut membangun sarana kebutuhan dasar, seperti air, pendidikan, kesehatan. Namun, pada kenyataannya, masyarakat tidak merasakan perubahan, bahkan kehidupannya cenderung kesulitan akibat akses untuk mencari ikan menjadi lebih jauh dan berimplikasi pada bertambahnya pengeluaran.

KEHANCURAN EKOLOGIS AKIBAT PERTAMBANGAN

PULAU BANGKA

Pada penghujung 2011, Bupati Minahasa secara tiba-tiba mengeluarkan izin untuk pertambangan bijih besi seluas 2.000ha kepada perusahaan asal China, PT Mikgro Metal Perdana. luas wilayah pertambangan tersebut sama dengan setengah dari luas Pulau Bangka.

Selain mengambil setengah luas lahan dari Pulau Bangka, operasi tambang tersebut juga merusak lingkungan sekitar. Kondisi pantai menjadi kotor, penggundulan hutan hijau, sampai menyebabkan air untuk kebutuhan warga menjadi tak layak dikonsumsi, memicu konflik antar desa antara pro dan kontra.

TAMBANG EMAS YANG MEMBUAT WAS-WAS

Kehadiran PT Gemala Borneo Utama untuk melakukan eksplorasi tambang emas membuat warga Pulau Romang cemas. Pasalnya, perusahaan masuk tanpa memberikan penjelasan secara terbuka dan komprehensif kepada masyarakat, bahkan telah berdampak pada rusaknya lingkungan di Pulau Romang.

KontraS menemukan sejumlah pelan[illegible] hak asasi manusia, antara lain

- Hak atas air bersih dan sehat
- Hak dan jaminan terhadap kelompok minoritas dan masyarakat adat
- Hak atas rasa aman
- Hak kebebasan bergerak untuk bepergian dan berpindah-pindah tempat
- Hak atas pelayanan kesehatan yang layak

PULAU ROMANG

Persoalan pertambangan maupun privatisasi di pulau kecil, telah menutup masalah sistemik terkait dengan pemenuhan hak-hak dasar dan memperburuk situasi dan kondisi di masyarakat.

REKOMENDASI

Secara konkret, KontraS berharap adanya evaluasi dari kegiatan investasi yang ada di pulau kecil, baik di sektor pariwisata maupun industri ekstraktif. Hal tersebut dapat ditinjau sudah sejauhmana masyarakat mendapatkan manfaat dari kehadiran investasi. Pemerintah pusat dan daerah tidak bisa lepas tangan pasca mengeluarkan izin kepada investor untuk berinvestasi di pulau kecil.

Kasus yang terjadi di Pulau Bangka, Pulau Sunut, dan Pulau Romang menunjukkan bahwa implementasi dari peraturan perundang-undangan yang mendukung kelestarian pulau kecil tidak maksimal sampai di tingkat masyarakat.

KontraS melihat bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil juga belum mendetail persoalan pendekatan pembangunannya. Padahal, tiap pulau memiliki kondisi lingkungan biofisik yang khas, sehingga perlu menjadi pertimbangan dalam kajian dan penentuan pengelolaannya agar berkelanjutan.